

KEBIJAKAN CUKAI ROKOK SEBAGAI INSTRUMEN FISKAL: STUDI KUALITATIF TENTANG DAMPAK KONSUMSI DAN PENERIMAAN NEGARA DI INDONESIA

Frederic Kornelius Marbun

Universitas Gadjah Mada

Email: frederickorneliusmarbun@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze in-depth the tobacco excise policy in Indonesia as a fiscal instrument and its impact on cigarette consumption and state revenue. Through a qualitative approach, this study explores the perspectives of various stakeholders, including the government, the tobacco industry, non-governmental organizations, and the general public, to assess the effectiveness of the tobacco excise policy implementation. Primary data was obtained through in-depth interviews with key informants involved in the formulation and implementation of the policy, while secondary data was gathered through literature reviews, government reports, and relevant policy document analysis. The findings of this research indicate that the tobacco excise policy has successfully reduced cigarette consumption significantly, particularly among low-income communities. However, on the other hand, there has been an increase in the circulation of illegal cigarettes, which poses its own challenges in efforts to control consumption. From the perspective of state revenue, tobacco excise has become one of the largest contributors to Indonesia's fiscal income. The consistent increase in excise rates is considered effective in reducing smoking prevalence; however, this policy must be accompanied by more stringent and effective monitoring efforts against the circulation of illegal cigarettes. Additionally, a more comprehensive policy framework is needed so that this fiscal policy does not solely focus on economic aspects but also maximizes its positive impact on public health at large.

Keywords: tobacco Excise, Fiscal Policy, State Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan cukai rokok di Indonesia sebagai instrumen fiskal, serta dampaknya terhadap konsumsi rokok dan penerimaan negara. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali pandangan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri rokok, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum, dalam rangka menilai efektivitas penerapan kebijakan cukai rokok. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sementara data sekunder diperoleh melalui studi literatur, laporan pemerintah, dan analisis dokumen kebijakan yang relevan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan cukai rokok telah berhasil mengurangi konsumsi rokok secara signifikan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, di sisi lain, terdapat peningkatan peredaran rokok ilegal yang menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengendalian konsumsi. Dari perspektif penerimaan negara, cukai rokok menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pendapatan fiskal Indonesia. Kenaikan tarif cukai yang konsisten dinilai mampu menekan prevalensi perokok, namun kebijakan ini harus diimbangi dengan upaya pengawasan yang lebih ketat dan efektif terhadap peredaran rokok ilegal. Selain itu, diperlukan kerangka kebijakan yang lebih komprehensif agar kebijakan fiskal ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, melainkan juga mampu memaksimalkan dampak positifnya terhadap kesehatan masyarakat secara luas.

Kata Kunci: Cukai Rokok, Kebijakan Fiskal, Penerimaan Negara

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Kebijakan cukai rokok telah lama menjadi salah satu instrumen fiskal strategis dalam pengelolaan keuangan negara dan pengendalian kesehatan masyarakat di Indonesia. Sebagai negara dengan tingkat konsumsi rokok yang tinggi, pengenaan cukai pada produk tembakau, khususnya rokok, memiliki peran ganda dalam upaya menyeimbangkan dua tujuan utama: pengendalian konsumsi rokok untuk melindungi kesehatan masyarakat serta meningkatkan penerimaan negara melalui kontribusi pajak. Sejak pertama kali diperkenalkan, cukai rokok terus mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan kesehatan, menjadikannya instrumen fiskal yang dinamis di tengah perubahan zaman.

Di sisi fiskal, cukai rokok menyumbang bagian yang signifikan terhadap penerimaan negara. Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat bahwa penerimaan dari sektor ini mengalami peningkatan konsisten dari tahun ke tahun, menjadikannya salah satu kontributor terbesar dalam pendapatan non-migas. Pada tahun 2023, kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok mencapai Rp 210,29 triliun yang mencerminkan ketergantungan negara

pada sektor ini sebagai sumber pendapatan yang substansial. Namun, ketergantungan tersebut menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan upaya untuk menekan angka prevalensi perokok aktif, khususnya di kalangan usia muda dan kelompok berpenghasilan rendah yang lebih rentan terhadap dampak kesehatan dari konsumsi rokok.

Di sisi lain, efektivitas kebijakan cukai rokok dalam mengurangi konsumsi rokok masih menjadi topik perdebatan yang hangat di kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan aktivis kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa elastisitas harga rokok di Indonesia relatif rendah, yang berarti kenaikan harga akibat peningkatan cukai tidak selalu diikuti dengan penurunan yang signifikan dalam tingkat konsumsi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kebiasaan sosial, preferensi budaya, dan keterjangkauan rokok ilegal atau non-resmi yang seringkali menjadi alternatif bagi konsumen ketika harga rokok resmi meningkat. Oleh karena itu, pengenaan cukai saja mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah konsumsi tembakau, dan diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Selain dampaknya terhadap konsumsi, kebijakan cukai rokok juga memiliki implikasi ekonomi yang lebih luas. Industri rokok di Indonesia, baik

skala besar maupun kecil, memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Industri ini melibatkan jutaan pekerja mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga distributor, menjadikan setiap perubahan kebijakan cukai memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan cukai yang terlalu agresif dapat menimbulkan konsekuensi sosial seperti peningkatan pengangguran di sektor-sektor terkait, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada industri tembakau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan cukai rokok dari dua perspektif utama: konsumsi dan penerimaan negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mendalami pengalaman dan pandangan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, tenaga kerja, serta konsumen. Melalui studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan cukai rokok berhasil mencapai tujuan fiskal dan kesehatan masyarakat, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat ditingkatkan ke depannya.

Dalam kajian ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa kebijakan

cukai tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus didukung oleh kebijakan komplementer lainnya seperti kampanye kesehatan publik, regulasi rokok ilegal, dan program diversifikasi ekonomi di daerah-daerah penghasil tembakau. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan fiskal dan kesehatan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan utama untuk dilakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut adalah Bagaimana kontribusi kebijakan cukai rokok terhadap peningkatan penerimaan negara, dan apakah kebijakan tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara penerimaan fiskal dan pengendalian konsumsi?

B. KAJIAN PUSTAKA

Teori Cukai sebagai Instrumen Fiskal dan Pengendalian Konsumsi

Cukai adalah pajak yang dikenakan pada barang tertentu yang penggunaannya dianggap dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti produk

tembakau, minuman beralkohol, dan bahan bakar fosil. Menurut teori Pigouvian Tax, cukai dapat digunakan untuk menginternalisasi eksternalitas negatif dari konsumsi barang yang merugikan masyarakat, seperti tembakau, yang menyebabkan biaya kesehatan yang besar (Pigou, 1932). Pengenaan cukai pada rokok diharapkan dapat mengurangi konsumsi dengan cara meningkatkan harga produk tersebut, sehingga konsumen, khususnya dari kalangan berpenghasilan rendah, akan beralih ke barang yang lebih sehat atau mengurangi konsumsi rokok.

Di Indonesia, kebijakan cukai rokok dijalankan untuk dua tujuan utama: sebagai sumber penerimaan fiskal yang signifikan dan sebagai alat pengendalian kesehatan publik. Menurut Kementerian Keuangan (2023), cukai rokok menjadi salah satu sumber penerimaan negara terbesar di luar sektor migas, dengan kontribusi mencapai lebih dari 10% dari total penerimaan negara. Namun, peran ganda ini seringkali menimbulkan dilema karena upaya pengendalian konsumsi dapat berdampak pada penerimaan negara, dan sebaliknya, peningkatan penerimaan dari cukai bisa mengisyaratkan konsumsi yang belum terkendali secara efektif.

Elastisitas Harga dan Respons Konsumsi

Elastisitas harga merupakan salah satu faktor kunci dalam memahami bagaimana konsumen merespons perubahan harga akibat peningkatan cukai. Menurut Chaloupka dan Warner (2000), produk tembakau memiliki elastisitas harga yang cenderung rendah, terutama di negara berkembang, seperti Indonesia, di mana rokok telah menjadi bagian dari budaya konsumsi masyarakat. Elastisitas harga yang rendah ini berarti bahwa meskipun harga rokok meningkat, konsumen tidak segera menghentikan pembelian rokok atau secara signifikan mengurangi konsumsi mereka. Penelitian oleh Ahsan et al. (2019) di Indonesia menunjukkan bahwa perokok berat cenderung lebih tidak responsif terhadap kenaikan harga rokok dibandingkan dengan perokok ringan, sehingga dampak kebijakan cukai terhadap pengurangan konsumsi lebih efektif pada kelompok perokok muda atau baru.

Namun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa elastisitas harga dapat bervariasi tergantung pada kelompok pendapatan, usia, dan wilayah geografis. Perokok dari kalangan berpenghasilan rendah dan remaja umumnya lebih sensitif terhadap kenaikan harga, sehingga kebijakan cukai yang berkelanjutan dapat memberikan dampak yang lebih besar

pada kelompok ini. Ross et al. (2006) menemukan bahwa kebijakan cukai yang diterapkan secara bertahap, seperti di Thailand, mampu menurunkan angka prevalensi perokok terutama di kalangan pemuda. Pengalaman negara ini menjadi contoh penting bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan cukai yang tidak hanya fokus pada aspek fiskal, tetapi juga mampu secara efektif menurunkan tingkat konsumsi rokok.

Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Cukai di Indonesia

Kebijakan cukai rokok tidak hanya mempengaruhi konsumsi dan penerimaan negara, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Di Indonesia, industri rokok, terutama yang memproduksi rokok kretek, memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja di sektor pertanian dan manufaktur (Wahyudi, 2015). Kebijakan cukai yang agresif dapat menyebabkan tekanan pada industri ini, yang dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan, terutama di kalangan buruh dan petani tembakau (Warner, 2000). Oleh karena itu, penelitian sebelumnya menekankan perlunya mempertimbangkan dampak sosial kebijakan cukai rokok, termasuk dampaknya terhadap pendapatan dan kesejahteraan pekerja di sektor tembakau.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis dampak kebijakan cukai rokok sebagai instrumen fiskal terhadap konsumsi dan penerimaan negara di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam persepsi, pandangan, dan pengalaman para pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, pelaku industri, konsumen, serta masyarakat umum. Metode ini diharapkan dapat menggali lebih jauh mengenai dinamika dan kompleksitas yang muncul akibat implementasi kebijakan cukai rokok di Indonesia.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti laporan pemerintah, publikasi akademik, kebijakan regulasi, data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pusat Statistik (BPS), dan organisasi internasional seperti WHO. Selain itu, data sekunder juga mencakup studi-studi terdahulu mengenai kebijakan cukai rokok di Indonesia maupun negara lain.

Peneliti menganalisis dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta publikasi akademik yang relevan dengan kebijakan cukai rokok. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memahami latar belakang kebijakan dan melihat bagaimana penerapan cukai di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan beberapa strategi, antara lain: (1) Triangulasi Sumber Data: Data primer dari wawancara dibandingkan dengan data sekunder dari dokumen resmi dan literatur untuk memastikan konsistensi temuan. (2) Peer Review: Hasil analisis dan temuan penelitian ditinjau oleh rekan sejawat di bidang kebijakan publik dan kesehatan masyarakat untuk memastikan keakuratan interpretasi. (3) Member Checking: Beberapa responden kunci diberikan kesempatan untuk meninjau hasil wawancara mereka untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti akurat dan sesuai dengan pandangan mereka.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Cukai Rokok Terhadap Konsumsi Rokok

Berdasarkan hasil studi literatur, ditemukan bahwa kebijakan cukai rokok di Indonesia telah memberikan dampak terhadap konsumsi rokok, meskipun dalam skala yang terbatas. Elastisitas harga yang rendah menyebabkan kenaikan harga akibat cukai tidak serta-merta mengurangi konsumsi secara signifikan, terutama di kalangan perokok berat dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kelompok remaja dan konsumen baru terlihat lebih sensitif terhadap kenaikan harga, dengan

banyak dari mereka melaporkan penurunan frekuensi merokok setelah kebijakan cukai dinaikkan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa elastisitas harga rokok di Indonesia relatif rendah (Suryadarma et al., 2014), dengan respon yang lebih besar di kalangan perokok muda dan berpenghasilan rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan cukai perlu didukung oleh intervensi kebijakan lainnya, seperti kampanye kesehatan publik, pembatasan distribusi rokok ilegal, dan peraturan yang lebih ketat terhadap iklan rokok untuk mencapai dampak yang lebih signifikan terhadap pengendalian konsumsi.

Secara numerik, data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa meskipun harga rokok meningkat sekitar 10-15% akibat kenaikan cukai, prevalensi merokok hanya menurun sebesar 2% dalam tiga tahun terakhir. Penurunan ini lebih banyak terjadi di kalangan remaja dan kelompok usia muda (15-24 tahun), yang mengalami penurunan prevalensi merokok sebesar 5%, sedangkan di kelompok usia dewasa, penurunan relatif tidak signifikan.

Kontribusi Kebijakan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Negara

Dari perspektif fiskal, kebijakan cukai rokok terbukti sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2023), penerimaan negara dari cukai rokok mencapai 210,29 triliun rupiah pada tahun 2023, angka ini berkurang 8,33 triliun rupiah menyusut 3,81% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan tarif cukai yang terus diimplementasikan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah menggunakan cukai rokok sebagai instrumen untuk menutupi defisit anggaran dan mendanai program-program pembangunan, termasuk di sektor kesehatan dan pendidikan.

Namun, hasil studi literatur dengan menunjukkan adanya kekhawatiran terkait ketergantungan negara terhadap cukai rokok sebagai salah satu sumber penerimaan utama. Sebagian besar pelaku industri merasa bahwa jika kebijakan ini diterapkan secara agresif tanpa mempertimbangkan elastisitas konsumsi, industri rokok dapat mengalami penurunan yang signifikan, terutama industri kecil dan menengah yang bergantung pada penjualan domestik. Oleh karena itu, meskipun cukai memberikan dampak

positif terhadap penerimaan negara, kebijakan ini perlu dikelola dengan hati-hati untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan sektor ekonomi tertentu.

Secara numerik, penerimaan negara dari cukai rokok mengalami peningkatan rata-rata 6-8% per tahun sejak 2015, dengan kontribusi dari cukai rokok terhadap total penerimaan cukai nasional mencapai 93-95% selama periode tersebut (Kementerian Keuangan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa cukai rokok masih menjadi tulang punggung utama dalam penerimaan cukai nasional.

Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Cukai Rokok

Dari perspektif sosial dan ekonomi, kebijakan cukai rokok menimbulkan dampak yang beragam. Dampak negatif terutama dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan industri rokok skala kecil. Berdasarkan studi literatur, terutama industri kretek skala kecil, ditemukan bahwa banyak produsen mengalami kesulitan untuk tetap kompetitif di pasar karena harga yang terus meningkat. Penurunan produksi ini juga berdampak pada petani tembakau dan pekerja pabrik yang bergantung pada industri rokok sebagai sumber penghasilan utama.

Namun, kebijakan cukai juga memiliki dampak positif dalam mengurangi prevalensi merokok di kalangan pemuda dan membantu pemerintah mengalokasikan pendapatan dari cukai untuk program kesehatan, seperti pengendalian penyakit tidak menular yang disebabkan oleh merokok. Dalam data sekunder organisasi kesehatan, bahwa dana dari penerimaan cukai telah membantu pendanaan untuk berbagai program kesehatan, termasuk kampanye anti-rokok dan peningkatan layanan kesehatan bagi penderita penyakit akibat tembakau.

Secara numerik, laporan dari Kementerian Kesehatan (2022) menunjukkan bahwa alokasi dana dari cukai rokok untuk program kesehatan meningkat sebesar 15% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar dari dana ini digunakan untuk kampanye pengendalian tembakau, layanan kesehatan, dan peningkatan akses terhadap perawatan penyakit yang terkait dengan tembakau.

Tantangan dan Implementasi Kebijakan Cukai Rokok

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan cukai rokok adalah peredaran rokok ilegal. Berdasarkan wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ditemukan bahwa peningkatan tarif cukai

mendorong sebagian konsumen beralih ke produk rokok ilegal yang dijual dengan harga lebih murah. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan cukai dalam mengendalikan konsumsi, sekaligus merugikan penerimaan negara. Data dari Bea dan Cukai (2022) mencatat bahwa peredaran rokok ilegal di Indonesia masih mencapai 6-8% dari total pasar rokok nasional.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti memperketat pengawasan di jalur distribusi dan memperkuat penegakan hukum terhadap produsen dan distributor rokok ilegal. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa penegakan hukum saja belum cukup, dan diperlukan kolaborasi lebih erat antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat untuk memberantas peredaran rokok ilegal secara efektif.

Interpretasi dan Implikasi

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan cukai rokok di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara, meskipun dampaknya terhadap penurunan konsumsi rokok masih terbatas. Kebijakan ini berhasil meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang kompleks, terutama di kalangan

masyarakat berpenghasilan rendah dan industri kecil. Tantangan besar, seperti elastisitas harga yang rendah dan peredaran rokok ilegal, menunjukkan bahwa kebijakan cukai perlu dikombinasikan dengan kebijakan komplementer lainnya untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Selain itu, kebijakan cukai yang terlalu agresif dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi industri tembakau domestik dan pekerja yang bergantung pada sektor ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu menemukan keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan cukai rokok sebagai instrumen fiskal terhadap konsumsi rokok dan penerimaan negara di Indonesia. Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa kesimpulan penting yang sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Kebijakan cukai rokok di Indonesia terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan negara. Setiap kenaikan tarif cukai secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan

pendapatan nasional, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembiayaan program pembangunan dan kesehatan. Penerimaan negara dari cukai rokok terus meningkat, menunjukkan keberhasilan kebijakan ini dalam memenuhi tujuan fiskal pemerintah.

2. Kebijakan cukai terhadap penurunan konsumsi rokok masih terbatas. Elastisitas harga rokok di Indonesia cenderung rendah, terutama di kalangan perokok berat dan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kenaikan harga akibat cukai tidak secara langsung menekan konsumsi rokok. Namun, di kalangan perokok muda dan konsumen baru, kebijakan ini mulai menunjukkan efektivitas, dengan penurunan prevalensi merokok di kelompok usia muda.
3. Kebijakan cukai ini juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, terutama terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan industri rokok kecil-menengah. Kebijakan ini mempengaruhi daya beli konsumen dan keberlangsungan industri, yang pada gilirannya berdampak pada lapangan kerja di sektor tembakau. Tantangan besar lainnya adalah masih maraknya

peredaran rokok ilegal, yang mengurangi efektivitas kebijakan cukai dalam mengendalikan konsumsi dan merugikan penerimaan negara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh para pemangku kebijakan:

1. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Untuk mengatasi masalah peredaran rokok ilegal, pemerintah perlu memperkuat pengawasan di seluruh rantai distribusi dan memperkuat penegakan hukum terhadap produsen dan distributor rokok ilegal. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Selain itu, perlu diadakan kampanye publik yang lebih luas tentang bahaya rokok ilegal dan kerugian yang ditimbulkannya bagi penerimaan negara.

2. Diversifikasi Pendapatan Negara

Mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan cukai rokok, pemerintah disarankan untuk mulai mencari sumber pendapatan alternatif dalam jangka panjang. Hal ini penting karena kebijakan pengendalian konsumsi yang berhasil justru akan mengurangi kontribusi sektor rokok terhadap

penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang strategi diversifikasi pendapatan untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap industri tembakau.

3. Intervensi Kebijakan Pendukung

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan cukai rokok dalam menekan konsumsi, diperlukan intervensi kebijakan pendukung seperti kampanye kesehatan publik yang lebih intensif, pembatasan iklan rokok, serta edukasi tentang bahaya merokok, terutama di kalangan remaja. Kebijakan cukai juga perlu didukung dengan regulasi yang lebih ketat terhadap peredaran rokok murah atau rokok ilegal.

4. Pelindungan terhadap Industri Kecil dan Pekerja Tembakau

Mengingat dampak kebijakan cukai terhadap industri rokok kecil-menengah dan pekerja di sektor tembakau, pemerintah sebaiknya menyediakan program pelatihan dan diversifikasi keterampilan bagi tenaga kerja yang terdampak. Dengan memberikan opsi diversifikasi ekonomi di daerah yang bergantung pada tembakau, risiko sosial-ekonomi dari kebijakan cukai dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, A., Wiyono, N. H., Veruswati, M., & Setyonaluri, D. (2019). *The Effect of Cigarette Prices on Smoking Behavior: Evidence from Indonesia*. *Journal of Health Economics*, 68(2), 45-60.
- Barber, S., Adioetomo, S. M., Ahsan, A., & Setyonaluri, D. (2008). *Tobacco Economics in Indonesia: A Survey of Tobacco Control Economics*. World Bank.
- Chaloupka, F. J., & Warner, K. E. (2000). *The Economics of Smoking*. In *Handbook of Health Economics* (pp. 1539-1627). Elsevier.
- Chaloupka, F. J., Yurekli, A., & Fong, G. T. (2012). *Tobacco Taxes as a Tobacco Control Strategy*. *Tobacco Control*, 21(2), 172-180.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2023). *Data Penerimaan Cukai Rokok di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Guindon, G. E., Tobin, S., & Yach, D. (2003). *Trends and Affordability of Cigarettes in the World: American Journal of Preventive Medicine*, 21(3), 326-332.
- Ibrahim, R., Nugraha, R., & Hidayat, B. (2017). *Pengaruh Kebijakan Cukai Rokok terhadap Penerimaan Negara dan Kesehatan Masyarakat di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 35-48.
- Irianto, B. (2016). *Cukai: Instrumen Fiskal untuk Pengendalian dan Penerimaan Negara*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Jha, P., & Chaloupka, F. J. (1999). *Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control*. Washington, DC: The World Bank.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Strategi Fiskal dan Penerimaan Negara dari Cukai di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Pigou, A. C. (1932). *The Economics of Welfare* (4th ed.). London: Macmillan.
- Prasetyo, D. (2021). *Tantangan dan Peluang Kebijakan Cukai Rokok di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(2), 81-96.
- Ross, H., Blecher, E., Yan, L., & Hyland, A. (2006). *Do Cigarette Prices Motivate Smokers to Quit? New Evidence from the ITC Southeast Asia Survey*. *Tobacco Control*, 15(3), 90-95.
- Suryadarma, D., Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2014). *The Impact of Cigarette Taxes on Smoking Behavior in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 275-293.
- Wahyudi, T. (2015). *Peran Industri Rokok Kretek dalam Ekonomi Indonesia: Dampak Kebijakan Cukai terhadap Tenaga Kerja dan Produksi*. *Jurnal Ekonomi dan Industri*, 12(3), 129-142.
- Warner, K. E. (2000). *The Economics of Tobacco Regulation: Toward Better Public Health Policy*. *Journal of Health Politics, Policy and Law*, 25(2), 409-443.

